

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

Industrialisasi Terhadap Pembangunan Kesejahteraan Di Jawa Timur

Agus Prianto

Administrasi Publik Universitas Yudharta Pasuruan

e-mail: Agus.prianto@yudharta.ac.id

Abstrak

Di era industrialisasi untuk negara-negara berkembang, ada banyak masalah, baik kurangnya sumber daya manusia, budaya masyarakat, sistem sosial, yang semuanya bermuara pada tingkat kesejahteraan sosial. Kehadiran Pemerintah di Sektor Industri adalah sebagai penyedia lapangan kerja dengan munculnya peraturan tentang perkembangan industri di Jawa Timur sejak 2015 pertumbuhan industrialisasi menjadi pesat, ini terlihat pada pertumbuhan di tahun 2013 sebesar Rp10,48 triliun, 2014 sebesar Rp13,02 triliun, dan pada 2015, target Rp 4,5 triliun dan realisasinya Rp 15 triliun. Namun, Indeks Pembangunan mengalami kemunduran di urutan ke 28 dari 38 kabupaten / kota dalam kemakmuran yang sama. Relativitas di atas memiliki konsekuensi untuk peluang kerja masyarakat dan peluang yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Meskipun terdapat permasalahan yang dihadapi dunia industri atas potensi masyarakat dalam kebijakan ketenagakerjaan. Namun, Pemerintah Jawa Timur memiliki keterbatasan dalam menyelesaikan dan menyediakan lapangan kerja, sehingga masih ada lapangan kerja tenaga kerja yang tidak berhasil menyediakan lapangan pekerjaan. Kurangnya sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah, perlu ada alternatif untuk membuka lapangan kerja di sektor informal, seperti diketahui bahwa sektor informal di Jawa Timur masih kurang peraturan dan perlindungan pekerja di sektor informal. Sehingga perlu memiliki peran kerjasama dengan sektor Informal dalam pencapaian lapangan kerja.

Kata Kunci : Kesejahteraan, Industrialisasi dan Sektor Informal

Industrialisation Of Welfare Development In East Java

Abstract

In the era of industrialization for developing countries, there are many problems, both the lack of human resources, the culture of society, the social system, which all boils down to the level of social welfare. The presence of the State in the Industrialization Sector is as a provider of employment with regulations on the development of industrialization in East Java since 2015 the growth of rapid industrialization is seen growth in 2013 of Rp 10.48 trillion, in 2014 amounting to Rp 13.02 trillion, and in 2015, a target of Rp 4.5 trillion and realization of Rp 15 trillion. However, the Development Index experienced a setback at 28th out of 38 regencies / cities in the same prosperity. The above relativity has consequences for community employment opportunities and opportunities that have an impact on people's welfare. Despite the problems facing the industrial world over the potential of the community in employment policies. However, the Jawa Timur Government has limitations in completing and providing employment, so that unsuccessful workforce employment is compromised by the low labor participation index. Lack of resources owned by the government, it is necessary to have alternatives to open employment in the informal sector, as it is known that the informal sector in East Java is still lacking regulation and protection of workers in the informal sector. So it is necessary to have the role of cooperation with the Informal sector in the achievement of employment..

Keywords: *Welfare, Industrialization and Informal Sector*

A. PENDAHULUAN

Kebijakan pembangunan kearah Industrialisasi memiliki dampak atas keterpurukan bagi masyarakat, tentunya pada negara dunia ketiga (NSB). Hal ini disebabkan bahwa mainset industrialisasi menjadi paradigma pembangunan di era global dan *Globalisasi* bagi negara Indonesia yang

memiliki konsekuensi logis atas keberadaan negara berkembang (NSB) untuk ikut merubah kebijakan pembangunan kearah Industrialisasi dengan adanya 5 tahapan transformasi sosial dari Tradisional, *Pra-take off*, *take off*, *maturity* and *Hight Consumption* (WW. Rowstow)

Outline pembangunan di Indonesia terlihat pada dokumen atas Rencana

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2005 dan 2025 yang menciptakan Indonesia yang aman dan damai, adil dan demokratis serta tingkat kesejahteraan meningkat dengan mengembangkan Iptek sekaligus penguasaan daya saing perekonomian yang berlandaskan keunggulan SDA dan SDM berkualitas serta kemampuan yang terus meningkat untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan diberbagai bidang.

Hal ini dilakukan dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif diberbagai wilayah didukung SDM berkualitas dan berdaya saing sehingga mengembangkan teknologi, dalam konteks teknologi sebagai ideologi merupakan *adoption policy* kearah Industrialisasi sebagaimana pemikiran Raul Prebisch *Subtitution Import* (Blomstroom & Hattne, 1984; Adewele, 2012) yang memvisualisasi atas negara Amerika Latin yang telah tersadarkan atas kondisi keterpurukan untuk mampu melakukan Industrialisasi.

Industrialisasi tidak selamanya menjadi tesis atas masalah perburuhan dan kesejahteraan masyarakat. Pada tentunya dunia industrialisasi menuntut untuk selalu melakukan inovasi teknologi guna memenuhi prinsip efisiensi dalam dunia usaha karena fakta pembangunan industrialisasi dan teknologi saling ketergantungan dan memiliki hubungan (Rosyadi, 2018) sehingga tidak mampu memberikan kontribusi atas penyediaan lapangan pekerjaan karena sumber daya manusia yang kurang bisa mengimbangi kemajuan teknologi dan juga pengurangan jumlah pekerja.

Sebagaimana dalam laporan World Bank (2009) yang mempelajari kasus industrialisasi di Negara Berkembang (NSB) memiliki masalah atas kemampuan penyerapan tenaga kerja disektor industri yang selalu melakukan inovasi dan berfikir efisiensi, belum lagi ditengah globalisasi yang berpeluang tenaga kerja asing untuk masuk ke Indonesia dan menjadi pesaing dengan warga Indonesia.

Data penyerapan tenaga kerja diIndonesia pada era Industrialisasi masih bermasalah, sebagaimana laporan Badan Statistik Tahun 2016 yang melihat angka pengangguran pada usia Produktif (15 Tahun) di Jawa Timur Mencapai 384.742 tinggi kedua

setelah Propoinsinya Jawa Barat sampai mencapai angka 616.331

Tabel 1. Usia Produktif

Tabel 2.21 Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Termasuk Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2013-2016
Population 15 Years of Age and Over Who are in Unemployment by Province and Sex, 2013-2016

Provinsi Province	2015				2016			
	Februari/February		Agustus/August		Februari/February		Agustus/August	
	Laki-laki Male	Perempuan Female	Laki-laki Male	Perempuan Female	Laki-laki Male	Perempuan Female	Laki-laki Male	Perempuan Female
Aceh	99 071	75 635	116 364	100 442	102 519	79 288		
Sumatera Utara	215 840	207 992	234 638	194 156	224 013	205 951		
Sumatera Barat	71 776	76 901	95 048	66 516	84 170	65 517		
Riau	123 431	76 338	115 240	101 813	96 341	80 607		
Jambi	29 899	16 838	42 428	27 921	48 574	34 499		
Sumatera Selatan	136 327	69 892	143 413	95 508	121 610	37 915		
Bengkulu	12 482	18 807	25 861	20 829	18 094	19 651		
Lampung	68 997	70 512	112 096	84 754	108 018	75 481		
Kepulauan Bangka Belitung	16 475	6 699	23 248	18 645	23 182	19 216		
Kepulauan Riau	47 866	33 150	36 993	18 325	63 059	19 407		
DKI Jakarta	258 465	205 440	239 696	128 494	217 737	88 488		
Jawa Barat	1 198 336	677 588	1 178 424	616 450	1 283 376	616 331		
Jawa Tengah	338 358	452 059	372 781	291 019	481 298	261 187		
DI Yogyakarta	61 622	23 832	41 961	38 284	41 145	17 896		
Jawa Timur	554 385	337 630	548 954	357 950	464 585	384 742		
Banten	332 781	156 102	335 517	173 866	313 373	138 685		
Bali	18 856	14 755	29 236	17 974	43 426	6 976		
Nusa Tenggara Barat	71 367	48 759	88 294	40 682	56 032	31 143		
Nusa Tenggara Timur	33 048	42 062	41 835	46 611	45 014	42 689		
Kalimantan Barat	80 058	33 139	81 193	40 144	65 913	44 837		
Kalimantan Tengah	26 577	13 862	35 047	22 733	22 869	24 370		
Kalimantan Selatan	62 318	37 637	60 496	37 252	50 322	24 072		
Kalimantan Timur	73 146	45 101	74 850	40 684	108 364	37 880		
Kalimantan Utara	6 077	8 515	10 579	5 500	8 085	3 142		
Sulawesi Utara	48 199	54 403	53 129	48 111	45 452	47 196		
Sulawesi Tengah	27 721	14 887	30 480	26 337	23 018	28 679		
Sulawesi Selatan	140 417	68 894	128 262	82 374	124 335	68 634		

Sumber ; Laporan Sensus Ekonomi Tahun 2016 oleh BPS

Sebagaimana data statistik BPS Tahun 2016 juga melihat atas tenaga kerja yang diserap berdasarkan sektoral, sebagaimana sumber Laporan Sensus Ekonomi tahun 2016 oleh BPS Sektor yang mampu menyerap tenaga kerja berada diklaster 1 adalah pada sektor Pertanian, Kehutanan, Perburuan, Perikanan, *Agricultur*, *Foresty* dan *fisheries* sebanyak 14.060.893, kluster 2 pada sektor perdagangan besar dan eceran, rumah makan, Hotel retail trade dan *restourant* sebanyak 15.065.772 sedangkan sektor industri menjadi kluter ke 4 setelah sektor jasa kemasyarakatan dengan sebanyak 9.395.166 sedangkan sektor industri sebanyak 6.623.456. dan sisanya dibagi dengan 6 kluter lainnya.

Pembangunan Industrialisasi terlihat pada tingkat serapan apakah ada diskriminasi terhadap gender atas berlakunya system demokrasi dan berlakunya HAM di masa industrialisasi terhadap pasar tenaga kerja dan perubahan keluarga, perempuan bekerja dan keguncangan budaya tradisional (Rahardjo, 2013).]\

Problem yang dihadapi dalam pembangunan menjadikan penyebab kurang maksimalnya sektor industri dalam menyerap tenaga kerja di sebabkan industrialisasi selalu berprinsip pada efisiensi dan efektifitas kinerja dengan berinovasi pada teknologi (Rosyadi,2018) sedangkan SDM pada Negara sedang berkembang memiliki keterbatasan sehingga kurang mampu mengikuti atas perkembangan teknologi. Sehingga kegagalan sektor indutri dalam menyediakan kebutuhan

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

sektor publik dalam lapangan pekerjaan yang kaitannya dengan Kesejahteraan Masyarakat. Perlu menyelaraskan strategi tentang akuisisi teknologi dengan sumber daya pra-masuk dan pasca-masuk dengan kemampuan (Chen and Chen, 2015).

Problem pembangunan pada industrialisasi di Jawa timur bagian dari RIPIN 2015-2035 dan KIN yang tertuang dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 sebagaimana Pasal 4 yang menjelaskan tentang kebijakan Industrial dan menjadi rencana jangka Menengah Pembangunan, hal ini memiliki keterkaitan pembangunan jangka menengah daerah pada industrial sehingga mampu mendukung pembangunan Industri di Jawa timur dengan Misi Utama Pemerintah Jawa timur adalah penguatan Industri dan percepatan Investasi.

Dampak globalisasi yang mendorong pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan dengan upaya mekanisme tenaga kerja menjadi bursa pasar tenaga kerja mewajibkan atas kekuatan Negara dalam mewujudkan kesejahteraan dalam masa transisi Industri, sebab pergeseran sejalan dengan tidak relevannya dominasi peran Negara (Keynesian) pada system ekonomi pasar global (Cenry, 1999 dalam Martanto, 2002, p.77) sehingga perlu adanya kajian masyarakat industri sebagai sarana kebijakan untuk menciptakan kesejahteraan terlebih pada masyarakat pluralistik yang memiliki kompleks problemnya dan kepentingannya.

B. PEMBAHASAN

Industrialisasi dinegara berkembang sangat dipengaruhi oleh situasi Negara tersebut, sehingga diperlukan sebuah tata kelola yang baik *good Management*. Easton (dalam Islamy, 2004:19), memberikan arti kebijakan negara sebagai *“the authoritative allocation of values for the whole society”* (pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat). Berdasarkan definisi tersebut menegaskan hanya pemerintahlah yang secara sah dapat berbuat sesuatu atau tidak melakukan Sejalan dengan pernyataan tersebut, Kebijakan pembangunan industry yang dipengaruhi kuat atas factor informal (budaya, kepribadian, etos kerja), dan teknologi dalam industrialisasi mendorong dampak atas problem pembangunan Industri di Negara Perkembang menjadikan problem

sebagaimana upaya ditengah pembangunan Industri harus mengutamakan atas hak kesejahteraan maka menjadi kinerja pemerintah untuk menciptakan pasar lapangan pekerjaan, sebagai upaya atas tantangan dimasa globalisasi, menuntut peran Negara untuk membuat inovasi untuk mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam dan lebih tergantung pada Sumber daya manusia sebagai konsekuensi adanya tekanan untuk andil dalam persaingan global dengan membuka luas lapangan pekerjaan dan menciptakan pembangunan industri yang efisien (Goh, 2005).

Era globalisasi memiliki dampak banyak dalam peran Negara untuk menjadi penyedia pelayanan publik. Ditahun 2010 s.d 2015 peningkatan penduduk relatif meningkat di Jawa timur dimana tingginya pertumbuhan penduduk memiliki dampak atas luasnya dan ketercukupan lapangan pekerjaan formal pada industrialisasi. Pertumbuhan penduduk tersebut memberikan dampak atas ketersediaan lapangan pekerjaan yang membangun atas kebijakan kesejahteraan masyarakat. Dengan tingkat kesejahteraan yang baik, maka mampu untuk menjadi kompetitor di era global, persoal nya adalah jumlah penduduk yang tinggi dan tingkat sumber daya manusia rendah maka menjadi masalah penghambat tersendiri.

Grafik.1 Kelompok Perusahaan industry Manufaktur Besar dan Sedang Jawa Timur 2014



KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

Kebijakan industrialisasi memang menjadi Road Mapp Pembangunan Indonesia dan tertuang dalam RPJP dan RPJM daerah pun harus selaras dengan kebijakan tersebut. Oleh sebab itu nampak atas tingginya industrialisasi terbanyak masih didominasi oleh kelompok industri makanan, yaitu sebanyak 1.801, perusahaan (27,82 %), industri tekstil sebanyak 537 perusahaan (8,30%), dan industri pengolahan tembakau berjumlah 446 perusahaan (6,89%), industri karet, barang dari karet dan plastic sebanyak 431 perusahaan (6,66%), industri furnitur sebanyak 399 perusahaan (6,16%), dan industri kayu, barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk furnitur) dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya sebanyak 353 perusahaan (5,45 %) (lihat grafik 2)

Masih didominasi oleh kelompok industri makanan, yaitu sebanyak 1.801 perusahaan (27,82%), industri tekstil sebanyak 537 perusahaan (8,30 %), dan industri pengolahan tembakau berjumlah 446 perusahaan (6,89 %), industri karet, barang dari karet dan plastic sebanyak 431 perusahaan (6,66%), industri furnitur sebanyak 399 perusahaan (6,16%), dan industri kayu, barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk furnitur) dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya sebanyak 353 perusahaan (5,45 %) (lihat grafik 2).

Sedangkan kelompok industri jumlahnya paling sedikit adalah industri produk dari batu bara dan pengilangan minyak bumi sebanyak 23 perusahaan (0,36 %), jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan sebanyak 29 perusahaan (0,45 %), industri komputer, barang elektronik dan optik sebanyak 36 perusahaan (0,56 %), industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional sebanyak 59 perusahaan (0,91 %), dan industri kendaraan bermotor, trailer dan semi trailer serta industri alat angkutan lainnya yaitu masing-masing sebanyak 65 perusahaan (1,00 %).

Jumlah tenaga kerja yang terserap pada perusahaan industri manufaktur besar dan sedang di Jawa Timur selama tahun 2014 sebanyak 1.076.217 orang dari jumlah penduduk pada tahun tersebut sebanyak 38.610.000 juta jiwa dengan asumsi 69.2 % (tabel 1) pada usia produktif (pekerja) sehingga dari angka tersebut angka indeks partisipasi kerja di Jatim relatif rendah sebagaimana angkatan kerja di tahun 2015 - 2017 mengalami kenaikan (tabel 2).

Tabel 2; Jumlah Penduduk dan laju Pertumbuhan

Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, 2010, 2014, dan 2015

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (ribu)			Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun (%)	
	2010	2014	2015	2010 - 2015	2014 - 2015
1. Blitar	1.418.770	1.638.483	1.650.000	0,88	0,27
2. Ponorogo	808.402	868.808	867.898	0,28	0,10
3. Trenggahan	676.544	688.793	689.202	0,40	0,16
4. Tulungagung	1.052.317	1.104.014	1.124.300	0,58	0,32
5. Malang	3.338.019	3.440.793	3.445.390	0,47	0,10
6. Kediri	1.908.000	2.108.000	2.108.000	0,50	0,00
7. Kabupaten	2.015.1897	2.127.087	2.144.116	0,78	0,68
8. Karanganyar	1.008.480	1.028.178	1.030.818	0,28	0,27
9. Jember	2.137.000	2.108.000	2.100.110	0,09	0,38
10. Banyuwangi	1.558.000	1.588.000	1.594.000	0,44	0,38
11. Mojokerto	748.000	758.000	764.000	0,41	0,80
12. Madiun	888.000	888.000	888.000	0,00	0,00
13. Probolinggo	1.098.000	1.112.000	1.112.000	0,78	0,00
14. Pasuruan	1.118.000	1.168.000	1.168.000	0,60	0,00
15. Sidoarjo	1.048.000	1.088.000	1.117.000	1,40	1,60
16. Kabupaten	1.028.000	1.078.000	1.080.000	0,98	0,19
17. Gresik	1.008.000	1.048.000	1.048.000	0,88	0,00
18. Pamekasan	1.018.000	1.032.000	1.032.000	0,48	0,00
19. Lamongan	1.018.000	1.032.000	1.032.000	0,48	0,00
20. Kabupaten	1.018.000	1.032.000	1.032.000	0,48	0,00
21. Paji	1.018.000	1.032.000	1.032.000	0,48	0,00
22. Kabupaten	1.018.000	1.032.000	1.032.000	0,48	0,00
23. Tulung	1.018.000	1.032.000	1.032.000	0,48	0,00
24. Kabupaten	1.018.000	1.032.000	1.032.000	0,48	0,00
25. Gresik	1.018.000	1.032.000	1.032.000	0,48	0,00
26. Kabupaten	1.018.000	1.032.000	1.032.000	0,48	0,00
27. Kabupaten	1.018.000	1.032.000	1.032.000	0,48	0,00

Yang artinya, bahwa banyak lulusan akan berdampak pada kebutuhan lapangan pekerjaan. Sebagaimana rencana Industrialisasi di Jawa Timur, memiliki dampak atas ketersediaan lapangan kerja pada sektor Industrialisasi, meskipun industrialisasi di Jatim tidak mampu menyerap tenaga kerja sebagaimana (grafik.2) Industri Tekstil (537 Orang), Industri Tembakau (446 orang), Industri Karet (432 orang), Industri Furnitur (391 orang) dan Industri kayu (353 orang) dan beberapa industri tersebut identik dengan teknologi didalam produksi maka secara otomatis didalam industrialisasi masih belum bisa menyerap tenaga kerja oleh sebab itu angka partisipasi kerja masih rendah yang masih stagnan atau berkisar antara 66 - 69 %. Sehingga separuh masyarakat berada pada pekerja tidak penuh atau disebut pengangguran terselubung.

Guna mengemban tanggung jawab, pemerintah perlu adanya kerjasama dengan pihak swasta dan masyarakat didalam menyediakan lapangan pekerjaan sebagaimana tujuan mensejahterakan kehidupan masyarakat *welfarestate*. Tanggung jawab yang di emban pemerintah juga dihadapi problem atas keterbatasan sehingga dalam kebijakan ketenagakerjaan masih belum bisa terpenuhi, sejalan dengan pertumbuhan jumlah penduduk, perbedaan taraf pendidikan, aksesibilitas informasi, kualitas pendidikan antar daerah berbeda, budaya yang belum mendukung dan masyarakat transisi dari sektor pertanian menuju industri menjadi permasalahan yang harus diselesaikan dengan cara bekerjasama dengan pihak lain.

Pendekatan kerjasama membahas dan menempatkan sektor swasta (informal) sebagai patnership untuk membuka lapangan pekerjaan dibidang Informal. Meskipun dalam

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

regulasi belum ada yang mengatur tentang kedudukan informal sehingga pemerintah harus segera membuat kebijakan disektor informal. Didalam prinsip *Cross Sectoral Collaboration* masih menempatkan pemerintah sebagai pemangku kepentingan sekaligus *provider* didalam berbagai jaminan sosial pada sektor informal.

Prinsip *kerjasama* selalu mengedepankan kontrak antar mitra, sebagaimana setiap mitra memiliki kepentingan baik bersifat profit atau non profit. Kerjasama kolaboratif juga bersifat kemitraan, jejaring yang menghubungkan secara independen untuk memenuhi kebutuhan publik, meskipun sektor swasta berfikir atas keuntungan dari memahami bagaimana pemerintah didalam melakukan kolaboratif, pilihan dan *trade off* yang dihadapi, sehingga peran pemerintah daerah di jawa timur secara fleksibel dapat menghadapi kepentingan kerjasama antar mitra.

Banyaknya pengangguran merupakan wujud atas kegagalan transformasi ketenagakerjaan yang hanya bisa menampung 60% tenaga kerja ditiap tahun, dan tentunya ditiap tahun ada kenaikan atas jumlah tenaga kerja 2% ditiap tahunnya. Maka sektor informal sangat penting untuk penopang, namun ada beberapa faktor untuk kesiapan atas dukungan didalam *collaboration* didalam penyiapan ketenagakerjaan disektor informal;

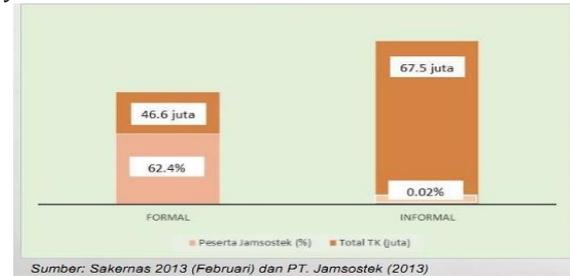
1. Kemudahan sistem perizinan disektor informal
2. Standarisasi kesejahteraan (upah) sektor informal
3. Adanya sistem perlindungan sosial tenaga kerja sektor informal.

Ketiga faktor tersebut, menempatkan sisi peranan pemerintah didalam kerjasama antar sektor sehingga mengurangi atas tumpang tindih peranan sektor publik, sektor swasta dan sektor nirlaba. Sektor publik menempatkan pemerintah menjadi penengah yang membuat kebijakan baik program ataupun regulasi, posisi pemerintah dalam kebijakan pengembangan sektor informal sebagai jaringan bisa berbentuk *Ad-Hoc Collaboration* dan *partnership*. Sebagaimana pengembangan sektor informal masih butuh untuk evaluasi karena sebagai jaminan sistem perlindungan sosial tenaga kerja informal, penguatan dalam mekanisme pengupahan, mengantisipasi ketimpangan bagi tenaga *unskill*.

Kemampuan perlindungan atas jaminan sektor informal dapat membantu pemerintah

dalam sistem jaminan sosial tenaga kerja, sebagaimana data Sakernas, 2013 dan PT Jamsostek 2013. Sektor informal mampu menyerap tenaga kerja hingga 67.5 juta jika sedangkan sektor formal hanya bisa menyerap tenaga kerja 46.6% juta jiwa dengan kemampuan keikutsertaan jamsostek formal lebih tinggi 62,4% ketimbang informal sebesar 0,02%. (Grafik. 3)

Grafik 2. Penyerapan lapangan Kerja dan Jamsostek



Dari data tersebut, maka perlu Pemerintah Jawa Timur membuat Regulasi Khusus terkait Jamsostek tenaga kerja Sektor Informal, yang mengatur tentang mekanisme kepesertaan tenaga kerja Informal terhadap program Jamsostek baik sisi Iuran, Peranan Negara, Adopsi dalam SISN tenaga kerja Informal.

Kegagalan sektor formal ditengah era industrialisasi maka pemerintah perlu mengevaluasi kembali sistem perizinan untuk lebih terjangkau dalam aspek biaya, kemudahan prosedur sehingga pelembagaan dalam mekanisme perizinan dapat mengetahui jumlah pasti sektor informal dan memudahkan didalam pengembangan dalam sisi permodalan. Dengan memiliki jumlah sektor informal yang resmi, akan mudah didalam *collaboration* lintas sektor untuk transformasi ketenagakerjaan formal dan informal.

C. PENUTUP DAN REKOMENDASI

Ketenagakerjaan menjadi masalah yang rumit kompleks di Jawa Timur, ketenagakerjaan menjadi salah satu trend pembangunan kesejahteraan di Jawa Timur, maraknya industrialisasi akan menjadi masalah tatkala dihadapi kesenjangan sosial dan patologi. Sehingga diperlukan sinergisitas atas kegagalan dalam transformasi ketenagakerjaan pada sektor Industrialisasi disisi lain, sektor informal mampu bertahan ditengah *global economic crisis* atas tekan ekonomi yang bermuara pada ketersediaan lapangan pekerjaan.

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

Dengan *Cross Sectoral Collaboration* pemerintah mampu menempatkan sebagai aktor dan pengawas atas ketersediaan lapangan ketenagakerjaan berada pada posisi *Ad Hoc Collaboration* atau *Partnership* dengan berperan pembuat regulasi atas standar upah dan jaminan sosial ketenagakerjaan. Regulasi yang dibutuhkan untuk kemudahan atau prosedur, dan mekanisme perolehan pengembangan permodalan yang bekerja sama dengan perbankan guna permodalan usaha sektor informal.

Martanto, Ucu. (2002). Kebijakan Sosial dan Kesejahteraan. FISIPOL UGM

Islamy, Irfan M, (2008). *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara* Jakarta: PT. Bina Aksara.

REFERENSI

Rosyadi, Slamet (2018) Revolusi Industri 4.0 Peluang Dan Tantangan Bagi Alumni Universitas Terbuka, di download <https://scholar.google.co.id/scholar>

Chen, Jian-Hung Chen and Yijen Chen (2015). *New Industry Creation in Less Development Countries The Case of The Taiwanese flat panel Display Industry*. Publish 29 Apr 2015

Goh. Andrew L.S. (2005). *Promoting innovation in aid of Industrial Development the Singaporean experience*. Vol. 18, No. 3, 2005